



(Kiri-kanan) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Depdagri Syamsul Arief, Direktur Jenderal Pemerintah Umum Depdagri Sodjuangan Situmorang, Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf, Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto.

Depdagri Kucurkan Dana DIPA Rp 68 Miliar Untuk 16 Kabupaten

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

SEJAK diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, dorongan serta aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru telah berkembang dengan sangat cepat. Saat ini sudah mencapai 148 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 114 kabupaten dan 27 kota.

Dengan semakin berkembangnya jumlah daerah otonom baru, maka

DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA DIPA

No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah DIPA
1.	Kab. Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	Rp 5 miliar
2.	Kab. Boven Digoel	Sulawesi Tengah	Rp 6 miliar
3.	Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	Rp 3 miliar
4.	Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	Rp 4 miliar
5.	Kab. Mamuju Utara	Sulawesi Barat	Rp 4,5 miliar
6.	Kab. Bone Bolango	Gorontalo	Rp 5 miliar
7.	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jambi	Rp 4 miliar
8.	Kab. Kepahiang	Bengkulu	Rp 4 miliar
9.	Kab. Muko-Muko	Bengkulu	Rp 4 miliar
10.	Kab. Way Kanan	Lampung	Rp 4,5 miliar
11.	Kab. OKU Selatan	Sumatera Selatan	Rp 4,5 miliar
12.	Kab. OKU Timur	Sumatera Selatan	Rp 3 miliar
13.	Kab. Katingan	Kalimantan Tengah	Rp 5 miliar
14.	Kab. Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	Rp 4 miliar
15.	Kab. Barito Timur	Kalimantan Tengah	Rp 4,5 miliar
16.	Kab. Raja Ampat	Irian Jaya Barat	Rp 3 miliar

konsekuensinya secara otomatis diharapkan daerah tersebut segera dapat mempersiapkan sarana dan prasarana antar kecamatan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak daerah pemekaran belum dapat melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal, khususnya pada tingkat pemerintah kecamatan.

Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara penyerahan bantuan tugas pembantuan Departemen Dalam Negeri untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan di daerah kabupaten pemekaran, Jumat (3/11) mengungkapkan pada tahun 2005 Departemen Dalam Negeri mengidentifikasi beberapa permasalahan pemekaran wilayah.

Yakni 87,71 persen daerah induk belum menyelesaikan penyerahan pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen kepada daerah baru. Sekitar 79 persen daerah baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. Sedangkan 89,48 persen daerah induk belum memberi dukungan dana kepada daerah otonom baru. Masalah lainnya 84,2 persen PNS sulit dipindahkan dari daerah induk ke daerah otonom baru, 22,8 persen pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi dan 91,23 persen daerah otonom baru belum memiliki rencana tata ruang dan wilayah.

DIPA Untuk Kecamatan

Karena ruang dan batas daerah pemekaran umumnya belum jelas, serta penetapan dan penegasan batas wilayah kurang mendapat perhatian, maka bermunculan masalah-masalah yang bersifat klasik dan baru. Seperti perbedaan persepsi antar daerah perbatasan serta aspirasi masyarakat yang menolak masuk pada daerah yang dimekarkan atau sebaliknya.

Menjadi suatu pemahaman bersama bahwa penyediaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan kecamatan sebenarnya merupakan kewenangan yang menjadi tugas pemerintah daerah kabupaten/kota. Yaitu melalui urusan desentralisasi seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2006. Namun dapat dimengerti pula tugas desentralisasi tidak dapat dibiayai oleh dana dari tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Melalui pertimbangan diatas,

Departemen Dalam Negeri menginisiasi dengan memberikan perhatian atas kondisi perkantoran pemerintah yang ada di daerah, melalui Program Tugas Pembantuan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemerintahan Kecamatan di Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran. Departemen Dalam Negeri menempatkan pembangunan kantor kecamatan di kabupaten pemekaran menjadi prioritas. Dengan harapan dengan adanya pembangunan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan kecamatan dan secara bertahap program ini akan terus digulirkan ke daerah pemekaran lainnya.

Maka guna mendukung kinerja jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk 16 kabupaten pemekaran, Depdagri telah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah serta Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi D.I Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.

Acara penyerahan kendaraan operasional tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Depdagri Syamsul Arief, Direktur Jenderal Pemerintah Umum Depdagri Sodjuangan Situmorang, Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto. Acara dilaksanakan di



Penyerahan bantuan dana DIPA program tugas pembantuan Departemen Dalam Negeri untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan di daerah kabupaten pemekaran sebesar Rp 68 miliar oleh Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf kepada 16 Kabupaten pemekaran di gedung Depdagri, Jumat (30/11).

menyerahkan DIPA program pembantuan berupa pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di daerah kabupaten kota pemekaran melalui APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2006.

Acara penyerahan dana DIPA kepada 16 Kabupaten/Kota pemekaran dilaksanakan bersamaan dengan acara penyerahan bantuan kendaraan operasional roda empat dan dua untuk 1 provinsi dan 6 kabupaten/kota serta penyerahan

gedung Departemen Dalam Negeri pada Jumat (3/10) dan dihadiri oleh para bupati dan walikota daerah-daerah yang menerima bantuan.

Menurut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief, pemberian DIPA program tugas pembantuan Departemen Dalam Negeri untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan di daerah kabupaten pemekaran dilatarbelakangi suatu keinginan Departemen Dalam

Negeri untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini juga didorong karena berdasarkan kunjungan lapangan dan beberapa permintaan serta laporan resmi dari para bupati daerah pemekaran, kondisi perkantoran pemerintahan kabupaten kota daerah pemekaran termasuk sarana dan prasarana kantor kecamatannya sebagian besar dalam keadaan tidak memadai.

"Berdasarkan pertimbangan keadaan tersebut diatas, Mendagri menginisiasi dengan memberikan perhatian atas kondisi perkantoran pemerintahan yang ada di daerah pemekaran," kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief. Yaitu dengan menempatkan pembangunan kantor kecamatan di kabupaten pemekaran menjadi prioritas untuk dapat memperbaiki pelayanan publik di tempat tersebut.

Total Rp 250 miliar

Program tugas pembantuan sarana dan prasarana pemerintah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang digulirkan sudah terlaksana pada tahun kedua. Pertama kali melalui APBN-P tahun 2005 telah dialokasikan dana sebesar Rp 42 miliar untuk 19 kabupaten/kota. Kemudian pada tahun anggaran 2006 melalui APBN telah dialokasikan dana sebesar Rp 140 miliar untuk 30 daerah kabupaten/kota.

Kemudian dilanjutkan akan diserahkan bantuan DIPA kepada 16 kabupaten/kota pemekaran melalui dana APBN-P 2006 sebesar Rp 68 miliar dengan kisaran antara Rp 3-6 miliar per kabupaten kota. "Dengan demikian total dana APBN yang telah didistribusikan pada kabupten kota pemekaran sampai tahun 2006 sebesar Rp 250 miliar," terang Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief.

Ruang lingkup kegiatan dari program tugas pembantuan Departemen Dalam Negeri yang didanai APBN-P 2006, jelas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief, adalah pembangunan baru kantor kecamatan, peningkatan sarana dan prasarana,

rehabilitasi kantor, pembangunan rumah dinas atau jabatan camat, pembangunan balai pertemuan dan pengadaan sarana pendukung administrasi kantor kecamatan.

"Sesuai dengan komitmen bersama, termasuk dengan DPR RI, Program Tugas Pembantuan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kecamatan ini diupayakan agar dapat diselesaikan pada anggaran 2007 yang akan datang," kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief. Dan bagi daerah



Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief memberikan kata sambutan dalam acara penyerahan dana DIPA.

kabupaten/kota yang belum mendapatkan pada saatnya nanti juga akan memperoleh sesuai dengan skala prioritas dan kriteria yang ditetapkan.

Arti Penting Kecamatan

Sejak direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan penting terhadap

kedudukan dan fungsi pemerintahan kecamatan. Yakni kedudukan kecamatan pada saat ini merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota. Dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Ini berarti, Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf menjelaskan, kecamatan mempunyai arti penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena keberhasilan otonomi akan sangat didukung oleh keberhasilan seorang camat dalam mengambil bagian penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. "Juga sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan," kata Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf yang memberikan kata sambutan dalam acara penyerahan bantuan DIPA di gedung Departemen Dalam Negeri, Jumat (30/11). Oleh karena itu, sambung Menteri Dalam Negeri kehadiran program ini akan memberikan dukungan terhadap optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang diketahui, program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga sekarang. Total dana yang telah dialokasikan sebesar Rp 250 miliar untuk 65 kabupaten/kota pemekaran. Ditambah dengan Rp 68 miliar dialokasikan untuk 16 kabupaten/kota pemekaran. Menurut Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf pada tahun 2007 berdasarkan pagu sementara telah ditetapkan dana sebesar Rp 95 miliar yang akan dialokasikan untuk 35 daerah kabupaten/kota pemekaran.

Bantuan dana DIPA yang disalurkan Departemen Dalam Negeri kepada 16 Kabupaten/Kota diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain berdasarkan tahun pemekaran, kapasitas fiskal, kondisi bangunan yang ada, jumlah kecamatan dan letak geografis dari daerah kabupaten/kota pemekaran.

Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf menginformasikan pada tahun ini Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) juga akan mendapatkan anggaran yang sangat besar dari pemerintah. "Oleh karena itu saya minta agar para bupati supaya betul-betul mulai mengadakan penelitian di lapangan, desa-desa mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk implementasi PPK ini," imbau Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf. ■ ten

Karena ruang dan batas daerah pemekaran umumnya belum jelas, serta penetapan dan penegasan batas wilayah kurang mendapat perhatian, maka bermunculan masalah-masalah yang bersifat klasik dan baru.